




Gerakan Islam Politik Milli Gorus dan Perempuan

Akhmad Rizqon Khamami

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia
rizqonkham@uinsatu.ac.id

 <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.1.97-112>

Abstract: This article discusses the views of Milli Gorus, an Islamic political movement from Turkey, on women, family and gender, and the position of women in the movement. The Milli Gorus Movement is the umbrella, or parent organization, of a number of Islamic parties in Turkey. A number of Islamic parties were born out of the Milli Gorus Movement. One of these Islamic parties is the AKP. Since 2002 this party has won the elections. After years of controlling the Turkish state bureaucracy, the AKP has succeeded in reorganizing the Islamic aspects of the Republic of Turkey in the face of modernity, secularism, and neoliberalism. Another aspect that needs to be studied is issue on women. After so many years of political Islam controlling Turkey, a question arise whether their perspective on women, family and gender changed. What is the Milli Gorus movement's view on the matters? To answer it, I present an overview of the emergence of the women's movement in Turkey, then discusses the views of the Milli Gorus movement regarding this matter. I assume that the views of the Milli Gorus movement remain conservative and unchanged, although in some cases they are flexible.

Keywords: *Milli Gorus, Women, Family, Gender.*

Abstrak: Artikel ini membahas pandangan Milli Gorus, sebuah gerakan politik Islam dari Turki, tentang perempuan, keluarga dan gender, serta posisi perempuan dalam gerakan ini. Gerakan Milli Gorus merupakan payung, atau organisasi induk, dari sejumlah partai Islam di Turki. Silih berganti sejumlah partai Islam lahir dari Gerakan Milli Gorus. Salah satu partai Islam

tersebut adalah AKP. Sejak 2002 partai ini memenangi pemilu. Setelah sekian tahun menguasai birokrasi negara Turki, AKP berhasil menata ulang aspek-aspek keislaman di Republik Turki behadapan denga modernitas, sekularisme, dan neoliberal. Aspek lain yang perlu dikaji adalah seputar perempuan. Setelah sekian tahun politik Islam menguasai perputaran Turki, apakah cara pandang mereka terhadap perempuan, keluarga dan gender berubah? Lalu, seperti apa pandangan gerakan Milli Gorus terhadap ketiga hal tersebut? Untuk menjawab ini penulis menghadirkan gambaran kemunculan gerakan perempuan di Turki, lalu membahas pandangan gerakan Milli Gorus terkait hal tersebut. Penulis berasumsi bahwa cara pandang gerakan Milli Gorus tetap berwarna konservatif dan tidak mengalami perubahan kendati dalam beberapa kasus bersikap fleksibel.

Kata Kunci: *Milli Gorus, Perempuan, Keluarga, Gender*

PENDAHULUAN

Sejak beberapa decade terakhir, gerakan Islam Milli Gorus menempati posisi penting dalam percaturan sosial dan politik Turki. Gerakan Islam ini telah melahirkan sejumlah partai Islam. Salah satu partai yang pernah berkuasa adalah partai Refah saat di bawah kepemimpinan Necmettin Erbakan. Segera setelah berdiri, partai Refah meraup kemenangan dalam pemilu. Kemenangan partai Refah ini menandai kembalinya Islam sebagai kekuatan penting di Turki setelah sekian dekade berada di bawah kekuasaan kelompok Kemalis, para pengikut ajaran Kemal Ataturk yang mengubah Republik Turki menjadi sekular. Selama Republik Turki berdiri, kelompok Kemalis sangat mendominasi perputaran politik dan sosial di negara ini.

Ketidak-sukaan kelompok militer terhadap kemenangan partai Refah berujung pada kudeta. Tidak saja Erbakan dipenjara, partai Refah juga dibubarkan oleh pihak militer. Akibat pembubaran partai ini, para pengikut Necmetting Erbakan yang tergabung dalam gerakan Islam politik Milli Gorus, terbelah menjadi dua kubu. Mereka yang ingin tetap melanjutkan gaya

politik partai Refah mendirikan partai sendiri, sedangkan mereka yang ingin menyesuaikan kondisi Turki saat itu mendirikan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi). Pada tahun 2002, AKP memenangi pemilu. Erdogan memenangi kursi parlemen, menjadi perdana menteri, hingga akhirnya menjadi presiden Turki.

Semenjak gerakan Milli Gorus memegang tampuk kekuasaan, Turki mengalami arus konservatif dalam bidang social, budaya dan politik. Proses menuju konservatisme ini menggunakan jalur politik liberal. Konservatisasi tersebut tidak semata-mata berasal dari ideologi Islam gerakan tersebut, tetapi dapat dianggap sebagai bentuk struktur patriarki yang merasuki seluruh pilihan gerakan Milli Gorus di Turki. Bentuk politik patriarki Milli Gorus merupakan contoh keterkelindanan antara nasionalis, neoliberal dan politik Islam. Bentuk patriarki pada Milli Gorus berbeda dari model patriarki lainnya di Turki, seperti kelompok Kemalis dan kelompok liberal. Meskipun gerakan Milli Gorus berhubungan secara intens dengan gerakan sosial lain, tetapi gerakan Milli Gorus tetap teguh pada pilihan ideologinya. Mereka tetap mempertahankan warna konservatisme dan semangat nilai-nilai Islam. Di tengah pandangan konservatif ini, muncul pertanyaan, bagaimana Milli Gorus melihat posisi perempuan, keluarga dan gender? Pandangan kelompok Milli Gorus terhadap isu perempuan, keluarga dan gender akan dikupas dalam pembahasan di bawah ini.

PEMBAHASAN

Kemunculan Gerakan perempuan

Gerakan Perempuan di Turki bermula dari abad kesembilanbelas pada era Kesultanan Ottoman. Agenda gerakan perempuan berkelindan dengan perubahan yang terjadi dalam sejarah politik Ottoman. Setelah itu perubahan besar terjadi bersamaan dengan berdirinya Republik Turki pada

tahun 1923.¹ Proses modernisasi, yang meliputi sekularisasi, merupakan periode pembentukan gerakan perempuan. Para pegiat perempuan tidak diperbolehkan untuk unjuk gigi secara terpisah dari bangunan republic Turki yang baru berdiri, dan dari ideologi resmi negara, yaitu Kemalisme, sebuah ajaran Pendiri Republik Turki Mustafa Kemal Ataturk. Kemalisme adalah dasar modernisasi yang meliputi nasionalisme, korporatisme dan sekularisme.²

Sejarah gerakan perempuan di Turki mengalami tiga tahap periode. Tahap pertama dimulai pada abad kesembilanbelas Kesultanan Ottoman dengan tuntutan ketersediaan pendidikan bagi perempuan. Tahap kedua dimulai dengan berdirinya Republik Turki. Pada tahap kedua ini terbentuk organisasi feminis independen. Mereka menuntut agar diberi perlakuan yang sama di ruang publik. Pada awal era republic, sekitar tahun 1923 hingga 1945, Kemalisme memonopoli isu-isu tentang perempuan. Akan tetapi, pada tahun 1960-an, kelompok Kiri dan kelompok Islamis muncul sebagai penantang monopoli wacana tersebut.³

Pada dua tahap tersebut, tuntutan perempuan harus dinegosiasikan dalam kerangka patriarki penguasa negara. Hal ini dikarenakan perselisihan di kalangan elit penguasa yang merasa puas dengan emansipasi perempuan yang sudah ada. Pada periode ini perempuan memperoleh banyak hak ekonomi dan hak politik yang menjadi tuntutan sejak era Ottoman.⁴ Mereka juga

¹ Leila Ahmed, "Early Feminist Movements in the Middle East: Turkey and Egypt," in *Muslim Women (RLE Women and Religion)* (London: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9781003074519>.

² Nilufer Gole, "Authoritarian Secularism and Islamist Politics: The Case of Turkey," in *Civil Society in the Middle East* (Brill, 1996), 17–43, https://doi.org/10.1163/9789004492936_005.

³ Sirin Tekeli, "Emergence of the Feminist Movement in Turkey," in *The New Women's Movement*, ed. Drude Dahlerup (London: Sage, 1986), 179–99.

⁴ Yesim Arat, *The Patriarchal Paradox, Women Politicians in Turkey* (Cranbury, NJ: Associated University Presses, 1989).

memperoleh kesempatan untuk tampil di ruang public. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sebelum lahirnya Republik Turki. Pada era ini, kebijakan gender kelompok Kemalis dibaca sebagai ‘state feminism’,⁵ yang bersikap represif terhadap apapun bentuk organisasi feminis yang independen.⁶ Pemberlakuan ‘state feminism’ memperlihatkan bentuk patriarki, dari kekuasaan absolut seorang ayah menjadi kekuasaan negara pada era Republik. Untuk memperoleh hak-haknya, perempuan harus bernegosiasi dengan patriarki melalui loyalitas terhadap moral yang diterapkan oleh Republik Turki dimana perempuan dianggap sebagai istri atau ibu. Pada masa Republik Turki, seorang ibu memiliki makna simbolis. Posisi wanita adalah menjadi ibu yang baik bagi negara.⁷ Dalam hal ini reformasi Kemalis menata ulang peran sosial tradisional.⁸ Dalam wilayah privat, ujar Arat, norma patriarki terus dijalankan, dilegitimasi dan dilanggengkan.⁹

Patriarki kelompok Republik menghegemoni wacana tentang emansipasi wanita hingga akhir tahun 1980-an dengan klaim bahwa perempuan Turki telah terlepas dari cengkeraman tradisi Kesultanan Ottoman dan Islam, dan menjadi setara sebagai warga negara Republik Turki. Semua perolehan emansipasi pada tahap ini menggunakan Kemalisme. Baru setelah kudeta tahun 1980-an, perempuan, terutama dari kelompok

⁵ Sedef Arat-Koc, “(Some) Turkish Transnationalism(s) in an Age of Capitalist Globalization and Empire: ‘White Turk’ Discourse, the New Geopolitics, and Implications for Feminist Transnationalisms,” *Journal of Middle East Women’s Studies* 3, no. 1 (2007): 35–57, <https://doi.org/10.2979/MEW.2007.3.1.35>.

⁶ Huriye Gokten Dogangun, *Gender Politics in Turkey and Russia: From State Feminism to Authoritarian Rule* (London: I.B. Tauris, 2020).

⁷ Nukhet Sirman, “The Making of Familial Citizenship in Turkey,” in *Citizenship in a Global World, European Questions and Turkish Experiences*, ed. Keyman E. F. and A. Icdygu (New York: Routledge, 2005), 147–72.

⁸ Arat, *The Patriarchal Paradox, Women Politicians in Turkey*.

⁹ Yesim Arat, *Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics* (Albany: State University of New York Press, 2005).

Kiri, mulai menyuarkan tuntutan mereka dari perspektif feminis. Pembacaan gerakan perempuan pada tahun ini membantu seseorang untuk memahami konteks kemunculan gerakan feminis.¹⁰ Kudeta 1980 yang mengantarkan rezim militer berkuasa, menandai titik penting yang meliputi perubahan struktur dan perubahan sistem nilai.

Sintesis antara Islam dan budaya Turki yang muncul setelah kudeta 1980, menjadi rujukan utama. Sesungguhnya sintesis tersebut bukanlah formula yang sama sekali baru. Sintesis ini diklaim disusun oleh sekelompok intelektual yang memiliki hubungan organik dengan kelompok nasionalis dari partai Milliyetçi Hareket Partisi tahun 1970-an. Sintesis tersebut bermaksud untuk membangun hubungan organik antara Islam dan Turki. Pilihan pihak penguasa militer pada sintesis tersebut dapat dibaca sebagai upaya untuk memperoleh persetujuan rakyat atas kekuasaan yang diperolehnya melalui kudeta. Adapun pemerintah sipil setelah berakhirnya masa kekuasaan rezim militer, mereka tetap memilih sintesis tersebut karena mereka berasal dari kelompok agama yang taat dan pengikut ekonomi liberal.

Aktivisme feminis muncul di era tersebut adalah ketika sekelompok feminis tertarik untuk mengodpsi sikap apolitis karena adanya pembatasan pada hak-hak politik mereka. Bersamaan dengan era institusionalisasi pada tahun 1990-an, gerakan perempuan Turki memanipulasi dinamika sosial yang terjadi pasca kudeta 1980. Dalam patriarki liberal, peran istri dan ibu tampaknya tidak memiliki hubungan dengan ruang publik. Peran sebagai istri dan ibu dianggap sebagai pilihan individu. Gerakan perempuan saat ini berada di bawah hegemoni liberal. Hal ini bukan berarti bahwa organisasi feminis-liberal mendominasi gerakan yang ada. Justru, liberalism membentuk cara dimana berbagai organisasi membentuk platform bersama dan terlibat

¹⁰ Nukhet Sirman, "Feminism in Turkey: A Short History," *New Perspective on Turkey* 3, no. 1 (1989): 1–34, <https://doi.org/10.15184/S0896634600000704>.

dalam aksi kolektif.¹¹ Patriarki model ketiga dapat disebut sebagai patriarki konservatif neoliberal. Model ini meminjam dari patriarki versi Islam. Tidak ada tawar-menawar dengan patriarki Islam dalam agenda gerakan perempuan. Para perempuan pengikut gerakan islamis terlibat dalam politik dan memperjuangkan kepentingannya.¹² Mereka dianggap sebagai penyokong dan pembela hak-hak perempuan Muslim, atau feminis Islam.

Bukan rahasia lagi bahwa masa neoliberal mendatangkan serangan balasan kepada gerakan feminis di seluruh dunia. Serangan ini berisi tuduhan bahwa aktivis feminisme adalah penyebab kerusakan moral. Para kaum feminis dianggap bertanggungjawab atas memudarnya sistem keluarga tradisional. Feminis dituduh melawan kodrat dan alam, moral, dan merusak tatanan keluarga. Keberadaan ideologi patriarki beriringan dengan pembatasan akses perempuan terhadap ruang publik dan lapangan pekerjaan. Sebuah studi tentang partisipasi perempuan Turki di era neoliberal mengungkapkan fakta tentang berkurangnya angka perempuan yang terserap dalam lapangan pekerjaan. Sebuah studi lain mengungkapkan adanya peningkatan angka perempuan bekerja di sektor informal. Studi ini melampirkan laporan bahwa Turki menempati peringkat ke 10 sebagai negara terendah dalam hal perempuan bekerja.

Keadaan ini melahirkan konfigurasi patriarki bentuk baru, yaitu moral konservatif yang dibangun di atas tradisi, keyakinan dan nilai-nilai keluarga. Aliansi neoliberal dengan neokonservatif sangat cocok dengan konfigurasi patriarki ini. Kebijakan neoliberal condong kepada pengutamaan hak milik dalam menyelesaikan hak-hak social. Meskipun neokonservatif

¹¹ Simten Coşar and Funda Gençoğlu Onbaşı, "Women's Movement in Turkey at a Crossroads: From Women's Rights Advocacy to Feminism," *South European Society and Politics* 13, no. 3 (2008): 325–44, <https://doi.org/10.1080/13608740802346585>.

¹² Arat, *Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics*, 115.

mengkritik sikap libertarian kelompok neoliberal, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam penguatan hak kekayaan personal sebagai salah satu batu bata bangunan keluarga yang dianggap sebagai sokoguru moral masyarakat. Menurut kelompok ini, keadilan gender lebih utama dibanding kesetaraan gender.¹³

Pada praktiknya, patriarki neoliberal dapat bertindak sebagai medium bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Namun hal tersebut juga memperdalam subordinasi perempuan akibat kebijakan perburuhan yang mengabaikan hak-hak social. Perempuan diminta untuk memilih antara memasuki dunia kerja atau tinggal di rumah. Mereka diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, namun pada saat yang sama diharapkan mampu mempertahankan peran sebagai istri dan sebagai ibu. Sepanjang neoliberal memilih untuk melakukan institusionalisasi pekerjaan, tenaga kerja perempuan dianggap sebagai asset yang siap dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang bergaji rendah. Dalam pengertian ini, eksploitasi perempuan melalui peminggiran dari pasar kerja ditransformasi menjadi eksploitasi tanpa ruang untuk klaim jaminan keamanan.

Yang membedakan perspektif gender antara neoliberal dan neokonservatif berasal dari pendekatan masing-masing pada isu-isu yang secara langsung terkait dengan hak atas tubuh perempuan seperti aborsi, kontrasepsi, dan lainnya.¹⁴ Bagi neokonservatif, gerakan feminis dianggap sumber penghancur masyarakat. Guna menyembuhkan penyakit ini, neokonservatif memilih untuk meningkatkan peran agama di ruang publik agar terbentuk moralitas sosial. Mereka mengkritik neoliberal karena sikap

¹³ Cagla Diner, "Gender Politics and Gongs in Turkey," *Turkish Policy Quarterly* 16, no. 4 (2018): 101–8.

¹⁴ Didem Unal, "The Abortion Debate and Profeminist Coalition Politics in Contemporary Turkey," *Politics & Gender* 15, no. 4 (2019): 801–25, <https://doi.org/10.1017/S1743923X18000703>.

permissive dan prinsip kebebasan individu.¹⁵ Sikap patriarki neoliberal dimiliki oleh Milli Gorus. Kendati begitu, struktur, operasi dan strateginya dibentuk lebih dekat dengan dinamika kontekstual di Turki seperti dibahas di bawah ini.

Perempuan Milli Gorus

Identitas Milli Gorus tercermin pada persepsi mereka tentang feminisme dan dukungan mereka terhadap hak perempuan. Pada satu sisi, sebagian orang bersikap skeptis terhadap kebijakan sosio-kultural gerakan Milli Gorus karena mereka percaya bahwa gerakan Milli Gorus diduga bermaksud mengurangi dan meniadakan partisipasi public perempuan. Pada sisi lain, menurut sebagian orang lainnya, gerakan Milli Gorus memberi optimisme dalam menghadapi pembacaan kelompok Republik terhadap Islam. Pada tahun 1980-an, politik Turki mengalami relokasi identitas kelompok Islam di ruang public. Mereka ditantang untuk memikirkan batasan antara modern dan tradisional. Islam yang selama ini diidentikkan dengan kemunduran dan keterbelakangan dalam imajinasi kelompok Kemalis, memperoleh momentum dengan melompati batasan dikotomi antara modernitas dan tradisi. Hal yang sama terjadi dalam isu gender yang diangkat oleh aktivis gender dan LSM.¹⁶

Bagi gerakan perempuan secara umum, Milli Gorus mewakili adanya perubahan sikap kelompok tradisional terhadap aktivisme perempuan. Akan tetapi hal tersebut juga memperlihatkan disposisi yang berubah-ubah terkait dengan organisasi perempuan serta tuntutan kelompok pegiat perempuan. Kebijakan yang memiliki sensitivitas gender dapat dilihat pada

¹⁵ Betül Yazar, "Neoliberal-Neoconservative Feminism(s) in Turkey: Politics of Female Bodies/Subjectivities and the Justice and Development Party's Turn to Authoritarianism," *New Perspective on Turkey* 63 (2020): 113–37, <https://doi.org/10.1017/npt.2020.18>.

¹⁶ Asuman Ozgur Keysan, *Activism and Women's NGOs in Turkey: Civil Society, Feminism and Politics* (London: I.B. Tauris, 2019).

perubahan aturan hukum Turki tahun 2004, yaitu adanya amendemen pada undang-undang yang mengamanatkan dimana sebuah kota berpenduduk lebih dari 50.000 orang maka wajib mendirikan shelter bagi perempuan, dan wajib membentuk komisi perempuan untuk persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki pada tahun 2009. Meskipun dirasa masih kurang untuk menjamin berkurangnya kekerasan berbasis gender, baik proses maupun hasil dari amendemen tersebut menandai pencapaian yang penting. Pengakuan terhadap kejahatan seksual sebagai kejahatan terhadap individu atau kejahatan terhadap integritas seksual merupakan langkah positif. Kesediaan pemerintah untuk menyediakan shelter bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga mengisyaratkan adanya pengakuan terhadap kekerasan rumah tangga sebagai isu nasional. Aktivis perempuan berhasil mempengaruhi pembentukan undang-undang tersebut.¹⁷

Kebijakan di atas memperlihatkan sikap tegas gerakan Milli Gorus. Hal yang sama juga dapat dilihat pada peran perempuan anggota gerakan tersebut. Mereka tidak saja aktif menjangkau perempuan konservatif, tetapi juga aktif dalam parlemen dan politik local. Gerakan Milli Gorus berhasil menempatkan perempuan pada struktur organisasinya di pusat maupun di daerah. Sebagian aktivis perempuan diminta untuk menyalonkan diri sebagai wakil rakyat dalam pemilu, pimpinan Milli Gorus tetap memilih perempuan dengan latar belakang secular dan berpendidikan Barat sekalipun, asalkan mereka memiliki sensitivitas terhadap Islam. Tampaknya loyalitas terhadap pemimpin juga merupakan kriteria seleksi tersebut. Para pengikut Milli Gorus sulit disebut sebagai politisi yang pro terhadap hak-hak perempuan.

¹⁷ Devran Gulel, "Feminist Movement and Law-Making in Turkey: A Critical Appraisal from 1998 to 2018," *Women's History Review* 30, no. 1 (2021): 2–27, <https://doi.org/10.1080/09612025.2019.1695357>.

Pendapat ini muncul jika kita melihat manuver kelompok ini saat menghadapi tuntutan kelompok feminis Turki.

Penekanan kelompok Milli Gorus pada keluarga mengingatkan kita pada motif nasionalistik. Motif ini dapat diperkuat dengan kebijakan pendidikan nasional. Buku-buku yang diajarkan di semua jenjang pendidikan merefleksikan pendekatan esensial terhadap sejarah dan identitas Turki. Wacana tentang kesucian keluarga terlihat nyata. Mereka menegaskan bahwa peran utama perempuan adalah menjadi ibu dan istri. Ketika cara pandang konservatif digemakan untuk melanggengkan peran tradisional bagi perempuan, kelompok neoliberal juga mensyaratkan adanya fleksibilitas pasar kerja tanpa mengganggu tanggung jawab perempuan terhadap rumah tangganya. Fleksibilitas neoliberal tidak menghilangkan peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri. Perempuan diduga memiliki jadwal padat saat mereka menggabungkan kerja rumah tangga dan kerja di luar, sekitar 15 jam setiap harinya.

Milli Gorus menunjukkan dimensi menarik atas sikap gerakan ini terhadap perempuan. Cabang perempuan gerakan ini berada di semua wilayah di Turki. Mereka mengadakan pertemuan bulanan, dan para pemimpin perempuan berkumpul. Para pemimpin tersebut berbangga bahwa perempuan bisa ikut aktif di dalam organisasi. Pada cabang perempuan level bawah diorganisir di tingkat desa. Mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemimpin organisasi. Mereka sukses merekrut pegiat perempuan baru, terutama bagi mereka yang belum pernah aktif di organisasi apapun sebelumnya.

Perdebatan soal jilbab di Turki memanasi pada tahun 1990-an. Perdebatan tentang jilbab merupakan parameter terjadinya polarisasi di Turki yang berujung pada kudeta 28 Februari, hingga melahirkan pelarangan jilbab

di universitas dan tempat umum.¹⁸ Isu ini terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik dan ruang public. Perempuan anggota Milli Gorus mengungkapkan bahwa sesungguhnya tidak ada problem jilbab di masyarakat. Menurut mereka, isu ini dieksploitasi oleh para politisi. Orang-orang yang harus bertanggungjawab atas peralihan isu jilbab menjadi persoalan yang memanas adalah elit birokrat-militer. Kendati pemimpin Milli Gorus mengungkapkan bahwa permasalahan jilbab bukanlah agenda utama tetapi mereka tetap menganggap persoalan jilbab adalah persoalan penting.

Sejak awal para pengikut Milli Gorus mengungkapkan bahwa isu jilbab bukanlah isu prioritas mereka, dan persoalan jilbab harusnya diselesaikan melalui consensus. Sikap ini terlihat sebagai sebuah refleksi transformasi gerakan Milli Gorus setelah kejatuhan pemerintah Erbakan. Milli Gorus acapkali menyebutkan bahwa isu jilbab harusnya dipahami dari perspektif hak dan kebebasan individu. Anggota cabang perempuan Milli Gorus sering mengungkapkan bahwa definisi jilbab jelas-jelas ditandakan di dalam al-Qur'an. Perempuan ini menyokong hak perempuan untuk memakai jilbab di ruang publik.¹⁹ Akan tetapi, mereka tampak enggan untuk memberi dukungan kepada perempuan lain yang memakai bentuk jilbab berbeda, karena bentuk lain ini dilihat bukan berasal dari ajaran agama.

Menurut Milli Gorus, masyarakat Turki terdiri dari 99 penduduk beragama Islam. Karena itu wajar saja jika politik yang ada di Turki merespon tuntutan mereka. Dalam konteks ini, identitas Milli Gorus sebagai gerakan islam menempati posisi penting sebagai salah satu komponen masyarakat Muslim. Mereka menegaskan bahwa gerakan Milli Gorus tidak

¹⁸ Elisabeth Ozdalga, *The Veiling Issue: Official Secularism and Popular Islam in Modern Turkey* (London: Routledge, 1998).

¹⁹ Gi Yeon Koo and Ha Eun Han, "To Veil or Not to Veil: Turkish and Iranian Hijab Policies and the Struggle for Recognition," *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 1 (2018): 47–70, <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1427663>.

menentang modernitas dan perubahan. Tetapi karena mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, maka nilai yang menjadi basis masyarakat pasti lah berasal dari Islam. Menempatkan diri dalam sejarah panjang ideology konservatif, Milli Gorus menyuarakan konservatisme sebagai aspek yang membedakan dirinya dari gerakan social lainnya. Perempuan pengikut Milli Gorus menyebut konservatisme sebagai sintesis antara tradisi dan perubahan. Karena itu prinsip yang dianut perempuan Milli Gorus diungkapkan sebagai adaptasi terhadap perkembangan teknologi, prinsip perubahan dan transformasi dengan dunia modern dengan tetap mempertahankan tradisi yang dibentuk oleh peradaban lama dan nilai-nilai masyarakat. Mereka menegaskan bahwa dirinya tidak menentang perubahan dan modernitas tetapi perubahan ini harus diambil dengan tetap mempertahankan nilai sosial bangsa Turki. Mereka menegaskan bahwa bangsa Turki membutuhkan keadilan gender, bukan kesetaraan gender.²⁰

Para pengikut Milli Gorus mengklaim memiliki pemahaman evolusioner tentang perubahan, yang berbeda dari pendekatan revolusioner dan. Perubahan radikal akan memberangus warisan masa lalu. Modernisasi harus dijalankan tanpa membahayakan struktur sosial. Tradisi adalah kendaraan utama dalam mempertahankan kesatuan struktur social. Struktur ini mengikat setiap individu dalam membangun solidaritas sosial. Berkat tradisi ini nilai masa lalu bisa ditularkan dan diwariskan ke generasi mendatang. Tradisi berisi tiga komponen yang saling terkait: yaitu, keluarga, Islam dan moralitas. Keluarga menempati titik sentral dalam ajaran konservatisme. Sebagai institusi sosial yang berfungsi mentransmisikan tradisi dan nilai sosial ke generasi berikutnya, keluarga tidak boleh hancur, dan

²⁰ Marella Bodur Ün, "Contesting Global Gender Equality Norms: The Case of Turkey," *Review of International Studies* 45, no. Special Issue 5: Special Issue on Populism (2019): 828–47, <https://doi.org/10.1017/S026021051900024X>.

kehanduran keluarga adalah dampak negatif dari era modern. Di samping keluarga, komponen penting dari sistem nilai yang diwariskan dari masa lalu adalah Islam. Dalam konteks ini Turki dilihat sebagai bagian dari peradaban Islam. Islam adalah perekat bangsa Turki karena 99 persen penduduk Turki beragama Islam. Nilai moral adalah elemen penting dari tradisi.

SIMPULAN

Sikap konservatif gerakan Milli Gorus berpengaruh besar pada peran dan posisi perempuan di tengah masyarakat. Perempuan dinilai sebagai inti terkecil bangsa. Perempuan di mata kelompok Milli Gorus berperan besar sebagai sosok penyalur nilai moral dan ajaran kebaikan kepada generasi berikutnya. Peran ini tidak lain karena perempuan berfungsi sebagai ibu dan sekaligus istri. Perempuan Milli Gorus memiliki perhatian besar pada moralitas dan Islam. Mereka melihatnya sebagai hal penting untuk hidup di tengah masyarakat yang menegakkan nilai-nilai moral dimana Islam dianggap sebagai pondasinya. Akan tetapi, peran kunci bagi masyarakat adalah perempuan karena perempuan, perannya sebagai ibu, akan mendidik generasi dengan nilai moral tinggi. Karena itu perempuan berkontribusi secara langsung pada transmisi nilai moral ke masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, Leila. "Early Feminist Movements in the Middle East: Turkey and Egypt." In *Muslim Women (RLE Women and Religion)*. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003074519>.
- Arat-Koc, Sedef. "(Some) Turkish Transnationalism(s) in an Age of Capitalist Globalization and Empire: 'White Turk' Discourse, the New Geopolitics, and Implications for Feminist Transnationalisms." *Journal of Middle East Women's Studies* 3, no. 1 (2007): 35–57.

- <https://doi.org/10.2979/MEW.2007.3.1.35>.
- Arat, Yesim. *Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics*. Albany: State University of New York Press, 2005.
- . *The Patriarchal Paradox, Women Politicians in Turkey*. Cranbury, NJ: Associated University Presses, 1989.
- Coşar, Simten, and Funda Gençoğlu Onbaşı. “Women’s Movement in Turkey at a Crossroads: From Women’s Rights Advocacy to Feminism.” *South European Society and Politics* 13, no. 3 (2008): 325–44. <https://doi.org/10.1080/13608740802346585>.
- Diner, Çağla. “Gender Politics and Gongsos in Turkey.” *Turkish Policy Quarterly* 16, no. 4 (2018): 101–8.
- Dogangun, Huriye Gokten. *Gender Politics in Turkey and Russia: From State Feminism to Authoritarian Rule*. London: I.B. Tauris, 2020.
- Gole, Nilufer. “Authoritarian Secularism and Islamist Politics: The Case of Turkey.” In *Civil Society in the Middle East*, 17–43. Brill, 1996. https://doi.org/10.1163/9789004492936_005.
- Gulel, Devran. “Feminist Movement and Law-Making in Turkey: A Critical Appraisal from 1998 to 2018.” *Women’s History Review* 30, no. 1 (2021): 2–27. <https://doi.org/10.1080/09612025.2019.1695357>.
- Keyvan, Asuman Ozgur. *Activism and Women’s NGOs in Turkey: Civil Society, Feminism and Politics*. London: I.B. Tauris, 2019.
- Koo, Gi Yeon, and Ha Eun Han. “To Veil or Not to Veil: Turkish and Iranian Hijab Policies and the Struggle for Recognition.” *Asian Journal of Women’s Studies* 24, no. 1 (2018): 47–70. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1427663>.
- Ozdalga, Elisabeth. *The Veiling Issue: Official Secularism and Popular Islam in Modern Turkey*. London: Routledge, 1998.
- Sirman, Nukhet. “Feminism in Turkey: A Short History.” *New Perspective on*

- Turkey* 3, no. 1 (1989): 1–34.
<https://doi.org/10.15184/S0896634600000704>.
- . “The Making of Familial Citizenship in Turkey.” In *Citizenship in a Global World, European Questions and Turkish Experiences*, edited by Keyman E. F. and A. Icduygu, 147–72. New York: Routledge, 2005.
- Tekeli, Sirin. “Emergence of the Feminist Movement in Turkey.” In *The New Women’s Movement*, edited by Drude Dahlerup, 179–99. London: Sage, 1986.
- Ün, Marella Bodur. “Contesting Global Gender Equality Norms: The Case of Turkey.” *Review of International Studies* 45, no. Special Issue 5: Special Issue on Populism (2019): 828–47.
<https://doi.org/10.1017/S026021051900024X>.
- Unal, Didem. “The Abortion Debate and Profeminist Coalition Politics in Contemporary Turkey.” *Politics & Gender* 15, no. 4 (2019): 801–25.
<https://doi.org/10.1017/S1743923X18000703>.
- Yarar, Betül. “Neoliberal-Neoconservative Feminism(s) in Turkey: Politics of Female Bodies/Subjectivities and the Justice and Development Party’s Turn to Authoritarianism.” *New Perspective on Turkey* 63 (2020): 113–37.
<https://doi.org/10.1017/npt.2020.18>.